Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN 1410-4946
Volume 7, Nomor 2, Nopember 2003 (161 - 174)

GLOBALISASI, KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN GLOBAL: Prioritas Keadilan dan Pentingnya Integrasi Ilmu Pengetahuan

Agus Wahyudi[*]

Abstract

The article discusses the phenomenon of globalization, poverty and global inequalities as a part of widely discussed topic of social justice. It finds that the discussion around the two phenomena has not yet reached the level of urgent priority as to find solutions and alternatives. It therefore encourages (social) sciences to recapture the topic and develops further by integrating the abstract and speculative humanities studies –especially that of political philosophy subject— with the more empirical and theoretical socio-political ones. It offers two ways of so doing: firstly, promoting the focus of study –both in political philosophy and socio-political research— on domestic and global aspiration of social justice. Secondly, exploring more on own (local and domestic) tradition to find appropriate norms and principles of social justice, i.e. to challenge those of the Western ethical tradition.

Kata-kata kunci: *globalisasi; kemiskinan; ketimpangan global; keadilan; ilmu pengetahuan.*

[*] ***Agus Wahyudi*** **adalah dosen pada Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.**

Pengantar

Bersamaan dengan maraknya pembicaraan tentang globalisasi sejak tahun 1980-an, banyak perdebatan telah dilakukan menyangkut pertanyaan tentang apakah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang sedemikian mencolok dewasa ini berhubungan langsung dengan fenomena yang sedang diperdebatkan. Akan tetapi, sejalan dengan ketiadaan definisi tunggal yang disepakati dari fenomena globalisasi, dan karena sebagai konsep kunci ilmu sosial makna sebenarnya dari istilah ini tetap diperdebatkan, para ahli juga berbeda pendapat dalam melihat sebab-sebab yang mendasari fenomena kemiskinan dan ketimpangan global, dan bagaimana fenomena ini berhubungan dengan globalisasi ekonomi.

Tulisan ini merupakan usaha memaparkan kembali perdebatan di sekitar fenomena globalisasi di satu pihak dan kemiskinan dan ketimpangan global di pihak lain, tetapi dengan tujuan yang lebih spesifik, yaitu menafsirkan makna di balik fenomena ini sebagai keharusan menempatkan keadilan sebagai prioritas. Masalah keadilan dalam perdebatan selama ini sering dianggap sebagai topik yang terpisah atau berdiri sendiri, meskipun diasumsikan dalam perdebatan itu, sehingga muncul anggapan bahwa keadilan merupakan bidang perhatian filsafat politik atau teori politik, sementara teori hubungan internasional, misalnya, cenderung tidak peduli (*indifferent*), jika bukan menunjukkan kebencian langsung (*actively hostile*) pada topik keadilan internasional sebagai fokus usaha intelektual (Brown, 1997: 274). Pandangan yang ingin saya pertahankan adalah sudah tiba saatnya ilmu-ilmu sosial-politik bergandengan tangan dan menyusun agenda bersama ilmu kemanusiaan seperti filsafat dalam rangka memberikan sumbangan untuk menangani skala masalah yang memang telah menjadi tragedi kemanusiaan terbesar yang menghina rasa keadilan dan kepekaaan moral.

Untuk itu, pada bagian pertama setelah pendahuluan ini, saya akan mendiskusikan perkembangan wacana globalisasi dan hubungannya dengan kemiskinan dan ketimpangan global. Argumen yang ingin saya pertahankan adalah meskipun hubungan keduanya tetap diperdebatkan, kemiskinan dan ketimpangan global mewujudkan diri sebagai masalah utama keadilan. Pada bagian kedua, saya akan

memperkenalkan contoh problematik dalam teori keadilan global dan mendiskusikan pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan filsafat, terutama filsafat politik dengan ilmu-ilmu empirik seperti studi sosial politik. Sebuah kesimpulan dan saran untuk kemungkinan agenda riset di masa depan akan mengakhiri tulisan ini.

Perkembangan Wacana

Sering dikatakan bahwa istilah baru seperti globalisasi menjadi populer karena ini memang menangkap perubahan penting yang terjadi di dunia (Baylish and Smith, 1997: 14). 'Globalisasi' pertama kali dicantumkan sebagai istilah dalam sebuah kamus pada tahun 1961, dan terminologi 'globalisme' diperkenalkan dalam sebuah buku kecil yang terbit tahun 1944. Akan tetapi, meskipun pengertian global telah dicerna selama masa yang panjang itu, istilah ini tidak pernah menjadi kosa kata sehari-hari dan jarang ada judul buku atau artikel yang terbit sebelum tahun 1975 yang mencantumkan referensi keglobalan, sementara dalam tahun 1980an istilah ini menjadi populer dan sedemikian luas dipergunakan. Apakah memang ada perubahan penting yang dapat menjustifikasi penggunaan istilah globalisasi?

Globalisasi sering dipahami secara sederhana sebagai menunjuk pada perubahan-perubahan signifikan yang telah terjadi di dunia selama empat dekade terakhir dalam abad ke 20 (Scholte, 1997a: 14). Meskipun sebagai sebuah konsep globalisasi sebenarnya sangat fleksibel dan dapat diakomodasi dalam rangkaian kerangka teoritis yang luas (Clark, 1997: 16), istilah ini dipakai untuk menunjuk peningkatan dalam hubungan batas wilayah (*cross border relations*), peningkatan dalam hubungan keterbukaan wilayah (*open border relations*), dan peningkatan dalam hubungan perubahan wilayah (*trans-border relations*) (Scholte, 1997b: 430). Selain itu, karena globalisasi dapat mendorong baik fragmentasi dan unifikasi, ini dengan sendirinya dilihat sebagai mengarah pada perkembangan integrasi global, yaitu 'tatanan dunia yang ditandai oleh perkembangan progresif masyarakat dan politik yang seragam dan menyatu' (Held, 1997: 92). Perwujudannya terlihat dalam teknologi komunikasi, organisasi jaringan lintas wilayah, bencana alam, produksi pabrik global, persenjataan global dan juga perubahan-perubahan dalam norma dan pemikiran orang sehari-hari

(Scholte, 1997a: 15-16). Jadi, dengan globalisasi, 'barang, modal, orang, pengetahuan, komunikasi dan senjata, dan juga kejahatan, polusi, mode pakaian, dan kepercayaan, berpindah dengan cepat melintasi batas-batas negara' (Held dan McGrew, 1998: 235). Karena itu, disarankan bahwa globalisasi paling baik dipahami sebagai ciri abad ini, yang 'melibatkan transendensi batas wilayah yang semakin pesat' (Scholte, 1997b: 430).

Akan tetapi, pengaruh globalisasi tidak pernah merata, karena terdapat segmen yang signifikan dari penduduk dunia yang tidak tersentuh secara langsung oleh globalisasi, atau kebanyakan dari mereka tetap terpisah dari keuntungan yang dihasilkan oleh globalisasi. Inilah salah satu alasan mengapa sebagian ahli memandang konsep globalisasi sebagai sangat tidak memuaskan. Pertanyaan yang diajukan adalah apakah arti 'global' dalam globalisasi? (Hirts, 1997, seperti dikutip Held dan McGrew, 2002: 4). Menurut pandangan ini, jika globalisasi tidak dapat dipahami secara literer, yaitu sebagai konsep universal, maka konsep globalisasi kehilangan kekhususan maknanya yang jelas. Yang juga bermasalah adalah konsepsi yang lebih subjektif atau relatif dari pengertian 'global' yang hanya dipahami dalam arti puncak hierarki dari skala ruang interaksi dan organisasi sosial, dari lokal menuju ke nasional, regional dan global. Bagaimana membedakan proses regionalisasi dari proses globalisasi, misalnya? Maka, justru karena kebanyakan literatur tentang globalisasi gagal menentukan referensi ruang untuk pengertian global, konsep globalisasi menjadi sangat luas dan tidak mungkin dioperasionalisasikan secara empirik, sehingga globalisasi untuk sebagian besar kurang bermakna sebagai cara memahami dunia kontemporer. Dalam arti inilah mengapa nilai penjelasan dan deskripsi dari konsep globalisasi dianggap harus dilupakan. Istilah globalisasi, kemudian sering dibedakan pengertiannya dengan istilah 'internasionalisasi', yaitu 'proses intensifikasi hubungan antar wilayah nasional' (Baylish dan Smith, 1997: 15) atau 'peningkatan saling keterkaitan antara masyarakat dan ekonomi yang secara esensial memiliki ciri tersendiri dan 'regionalisasi' atau 'triadisasi'—pengelompokan geografi dari pertukaran sosial dan ekonomi lintas wilayah' (dikutip dari Held dan McGrew, 2002: 4-5).

Jadi, di satu pihak, globalisasi dipercaya mencerminkan perubahan struktural yang sebenarnya dalam skala organisasi sosial

modern, seperti yang terbukti, misalnya, dalam pertumbuhan berbagai perusahaan multi-nasional, pasar uang dunia, difusi kebudayaan pop, dan kerusakan lingkungan global dan sebagainya. Di pihak lain, globalisasi dianggap tak lebih sebagai 'mitos yang dibutuhkan' (*a necessary myth*); melalui mana politisi dan pemerintah mendisiplinkan warga negaranya agar menyesuaikan diri dengan persyaratan pasar global. Jika argumen yang pertama menekankan konsepsi globalisasi dalam pengertian yang lebih multi-dimensional dan beragam; tidak menerima globalisasi hanya sebagai fenomena ekonomi, tetapi memberikan analisis globalisasasi dalam status sebagai kegiatan sosial, politik dan kebudayaan, argumen kedua menyatakan bahwa globalisasi tidak memberikan pemahaman pada kekuatan-kekuatan yang membentuk tatanan dunia kontemporer, melainkan menjalankan fungsi lain sebagai konstruksi ideologi yang membantu menjustifikasi dan melegitimasi proyek global neo-liberal, yaitu 'penciptaan pasar bebas global dan konsolidasi kapitalisme Anglo-Amerika dalam wilayah-wilayah utama ekonomi dunia' (dikutip dari Held and McGrew 2002: 5). Pendek kata, sementara kaum globalis menolak kepercayaan bahwa globalisasi hanya dapat dijelaskan dengan merujuk pada keharusan kapitalisme atau teknologi, atau sekadar sebagai proyeksi modernitas Barat di seluruh dunia, mereka yang skeptis percaya bahwa sebaliknyalah yang merupakan kasusnya, dan, 'tidak mengejutkan jika diskusi tentang globalisasi telah meluas pada titik persimpangan ketika proyek neo-liberal—konsensus Washington tentang deregulasi, privatisasi, program penyesuaian struktural, dan pembatasan peran pemerintah—mengkonsolidasikan pengendaliannya dalam institusi-institusi global dan kapital Barat yang utama seperti IMF' (Held dan McGrew 2002: 5).

Namun, dua perselisihan tentang status globalisasi pada gilirannya juga tidak pernah dapat memberikan penjelasan akhir tentang bagaimana hubungan globalisasi dan kenyataan mengenai kemiskinan dan ketimpangan global, meskipun data-data tentang ketimpangan kemanusiaan dan kemiskinan global dewasa ini sedemikian dramatik dan luas diketahui.

Pertama, berkenaan dengan ketimpangan global. Laporan UNDP tahun 1999, misalnya, menunjukkan bahwa sejak awal tahun 1980an, *ketimpangan domestik*, meningkat dalam banyak negara seperti China,

Eropa Timur dan Persemakmuran Negara Merdeka (*Commonwealth of Independent States*/CIS) dan dalam negara-negara OECD seperti Swedia, Inggris dan Amerika Serikat, sementara *ketimpangan antar negara* juga meningkat karena jurang pendapatan diantara seperlima penduduk dunia yang hidup di negara-negara kaya dan seperlima yang hidup di negara-negara miskin adalah 74 berbanding 1 dalam tahun 1971, meningkat dari 60 berbanding 1 dalam tahun 1990 dan 30 berbanding 1 dalam tahun 1960, sebagai tambahan bahwa 'lebih dari 80 negara memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan satu atau lebih dekade yang lalu, dan meskipun 40 negara dapat mempertahankan pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata lebih dari 3 per sen per tahun sejak 1990, 55 negara, kebanyakan di sub-sahara Afrika dan Eropa Timur dan CIS, mengalami penurunan pendapatan per kapita' (UNDP Report 1999: 343).

Jadi, meskipun telah terjadi integrasi ekonomi global selama beberapa dekade terakhir, ketimpangan global juga mengalami peningkatan (Pieterse, 2002: 1024). Akan tetapi, ketimpangan global bukan hal baru, dan fenomena ketimpangan ekonomi global telah ada sejak lama, meskipun dengan kecenderungan meningkat terus menerus. Datanya adalah 'kesenjangan pendapatan antara seperlima orang yang hidup dalam negara-negara kaya dan seperlima dalam negara-negara miskin adalah 74 berbanding 1 dalam tahun 1997, meningkat dari 60 berbanding 1 dalam tahun 1990 dan 30 berbanding 1 dalam tahun 1960'. Estimasi semula adalah 11 berbanding 1 untuk tahun 1913, 7 berbanding 1 untuk tahun 1870, dan 3 berbanding 1 untuk tahun 1820 (UNDP 1999: 3; dikutip dari Pogge 2001: 13).

Kedua, berkenaan dengan kemiskinan global, faktanya juga sama jika tidak lebih menyedihkan. Kenyataan menunjukkan bahwa sekitar seperempat dari jumlah manusia yang hidup sekarang ini, 1,5 milyar, berada di bawah garis kemiskinan internasional, jadi tingkat pembelanjaan atau pendapatan untuk mencukupi kebutuhan minimum makanan yang cukup bergizi, plus kebutuhan non-makanan tidak dapat dicapai (UNDP 1996: 222). Terlepas dari persoalan bagaimana mengukur kemiskinan global, akibat-akibat dari hal itu memang sangat serius, karena akan berarti bahwa '790 juta orang tidak cukup makan, 1 milyar tidak dilengkapi air yang sehat, dan 2,4 milyar tanpa sanitasi dasar; lebih dari 880 juta tidak punya akses pada pelayanan kesehatan;

sekitar satu milyar tidak memiliki tempat tinggal yang layak dan dua milyar hidup tanpa listrik' (UNDP 2000; 30: 1999: 22: 1998: 49; dikutip dari Pogge 2001: 7). Disamping itu, 'dua dari lima anak-anak di negara berkembang terhambat pertumbuhannya, satu dari tiga anak memiliki berat tubuh di bawah normal, dan satu dari sepuluh anak tersia-siakan (FAO, dikutip dari Pogge 2001: 7). Selain itu, seperempat dari jumlah anak-anak di dunia yang berumur antara lima sampai empatbelas tahun, 250 juta secara keseluruhan, harus bekerja di luar rumah untuk mendapatkan upah, seringkali harus mengalami kondisi yang sangat sulit, baik dalam pertanian, konstruksi, tekstil, atau produksi karpet, misalnya, atau sebagai tentara, pekerja seks, atau pembantu rumah tangga (World Bank 1999: ILO, lihat juga Pogge 2001, p. 8). Tentu saja, anak-anak tidak mendapatkan cukup pendidikan, dan sebagian besar dari mereka, jika dapat bertahan hidup cukup lama, kemungkinan akan termasuk dalam kelompok orang dewasa yang buta huruf yang jumlahnya mencapai satu milyar sekarang ini (UNDP 2000: 30; Pogge 2001: 8).

Maka, meskipun kesimpulan mengenai hubungan globalisasi di satu pihak, dan kemiskinan dan ketimpangan global di pihak lain tetap diperdebatkan, keduanya merupakan masalah mendesak dan perlu mendapatkan prioritas utama dalam agenda studi keadilan untuk membantu pengambilan keputusan. Tentu saja, studi tentang fenomena globalisasi dalam dirinya sendiri akan membuka cakrawala yang lebih luas dan mendalam mengenai hukum-hukum perubahan sosial di era sekarang ini, misalnya, karena pengetahuan kita mengenai hubungan-hubungan kekuasaan (*power relations*) yang mendasari kemiskinan dan ketimpangan akan bertambah, namun melepaskan pengetahuan globalisasi dari rasa prioritas (*a sense of priority*) keadilan akan membawa pada usaha yang remeh (*trivial*) dan sia-sia.

Jelas bahwa statistik tentang ketimpangan dan kemiskinan global dewasa telah banyak tersedia, tetapi penilaian mengatakan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi yang mengaburkan rasa prioritas tentang kemiskinan dan ketimpangan global sebagai agenda utama keadilan (bandingkan Pieterse, 2002, p. 1027). Di satu pihak, pada level domestik, seperti yang terlihat dalam sebagian besar masyarakat, termasuk mungkin masyarakat kita, kemiskinan dianggap sebagai tema yang sensitif secara politik, sementara ketimpangan tidak. Ketimpangan

dianggap kurang penting karena memang ada banyak posisi secara politik atau kefilsafatan dalam hubungannya dengan ketimpangan. Ketimpangan bahkan dilihat sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, dibutuhkan atau bahkan menguntungkan dalam rangka kemajuan tertentu. Ketimpangan penghasilan, misalnya, mungkin dapat diterima sejauh persamaan kesempatan terbuka seluas-luasnya. Sementara kemiskinan dianggap lebih peka dan menantang, karena ini dapat merusak kohesi sosial secara langsung: terutama pada saat kelompok-kelompok kepentingan atau kekuasaan memiliki pengaruh yang signifikan pada pola-pola distribusi dan kemiskinan yang ada (dikutip dari Pieterse 2002: 1043).

Di pihak lain, pada level global, sebaliknyalah yang terjadi. Kemiskinan global dianggap kurang penting, jumlah orang miskin memang mencemaskan, tetapi kemiskinan tidak terasa karena terjadi di tempat yang jauh. Ini menjelaskan mengapa, misalnya, meskipun negara-negara maju sebenarnya memiliki kemampuan untuk membantu mengurangi angka kemiskinan global, mereka percaya bahwa pengurangan kemiskinan paling baik dicapai melalui investasi privat dan pasar bebas dan mereka menolak tanggungjawab di luar pemberian bantuan minimal untuk negara-negara miskin (Jones 1999: 12; Pogge 2001: 6; De Martino 200: 10). Menarik dikemukakan bahwa menurut catatan UNDP dibutuhkan 6 milyar dollar per tahun untuk mencukupi "pendidikan dasar bagi semua orang" dan dibutuhkan 9 milyar dollar per tahun untuk mencukupi kebutuhan "air dan sanitasi bagi semua orang," dan ini bukan masalah yang besar jika diingat bahwa,

> pengeluaran untuk makanan hewan piaraan di Eropa dan Amerika Serikat adalah 17 milyar per tahun, pengeluaran untuk es krim di Eropa adalah 11 milyar per tahun, dan pengeluaran per tahun untuk rokok di Eropa adalah 50 milyar dollar (UNDP 1998: 37: dikutip dari Caney 2001: 126).

Walaupun mungkin jelas bahwa kemiskinan dan ketimpangan global harus dilihat sebagai prioritas keadilan, perbedaan yang terlihat pada dua level persepsi itu menjelaskan rumitnya masalah keadilan. Seperti sering diakui, keadilan global merupakan subjek yang rumit (*an intricate subject*), dan sama sekali tidak jelas bagaimana menemukan pemecahan langsung (Hinsch, 2001: 54), namun seperti yang akan kita

lihat, bukan berarti tidak ada landasan untuk memulai penyelidikan masalah ini.

Ke Arah Integrasi Ilmu Pengetahuan

Dalam masalah keadilan distribusi internasional dewasa ini terdapat sedikitnya dua pandangan yang saling bersaing berkenaan dengan prinsip-prinsip keadilan dan asumsi standar dari cita-cita keadilan distributif—penilaian untuk menentukan *dari siapa* dan *pada siapa* barang-barang harus didistribusikan (Caney 2001: 975: lihat juga Hinsch 2001: 55; Jones 1999: 1-2). Pandangan pertama menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan distributif harus dioperasikan dalam negara, atau harus diadopsi pada tingkat negara (*state level*) atau tingkat bangsa (*nation level*), dan karena itu, redistribusi kekayaaan dari mereka yang kaya (*the wealthy*) dalam suatu negara atau bangsa pada anggota-anggota masyarakat yang kurang beruntung mungkin dibutuhkan. Menurut pandangan ini, keadilan global direalisasikan bersama dengan negara-negara yang secara internal adil yang bekerjasama atas dasar konsepsi keadilan internasional, sehingga keadilan distributif merupakan gagasan yang secara khusus *bersifat domestik*, mengatur ketimpangan ekonomi dan sosial dalam suatu negara atau masyarakat. Pandangan kedua menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip keadilan global atau bahwa prinsip keadilan harus memiliki *jangkauan global*. Menurut teori ini, prinsip-prinsip keadilan distributif berlaku tidak peduli batas wilayah nasional dan bahwa tiap-tiap warga negara menerima hak atas bagian kekayaaan global sebagaimana ditentukan oleh konsepsi keadilan global.

Tentu saja, masih terdapat sejumlah pandangan di luar kedua pandangan itu. Studi Simon Caney membagi empat pendekatan pada keadilan distribusi internasional ke dalam pendekatan kosmopolitan (yang menyatakan bahwa prinsip distributive harus beroperasi secara global), pendekatan nasionalis (yang menekankan kewajiban khusus pada sesama warga negara), pendekatan masyarakat-negara (*society of states*) (yang mengklaim bahwa prinsip keadilan distributif global melanggar kemerdekaan negara) dan pendekatan realis (yang mengklaim bahwa keadilan global adalah utopian dan bahwa negara harus memajukan kepentingan nasionalnya) (lihat diskusi Caney 2001),

disamping juga usaha Rainers Forst dalam mengembangkan teori keadilan transnasional (Forst, 2001: 169-188). Meskipun mungkin bahwa di antara masing-masing pandangan itu akan sulit didamaikan, semuanya menunjukkan bahwa ada kesepakatan tentang bagaimana memulai menyelidiki masalah keadilan dan karena itu juga menjelaskan bahwa tersedia ruang yang luas untuk menangani isu keadilan sebagai prioritas yang harus ditangani dalam konteks globalisasi.

Contoh-contoh itu, untuk sebagian besar memang merupakan hasil pencapaian ilmu-ilmu kemanusiaan, terutama bidang studi filsafat politik. Terutama dari karya-karya sarjana Barat dapat dilihat kemajuan yang sangat pesat bukan hanya dalam mensistematisasikan berbagai pandangan tentang keadilan, tetapi juga dalam usaha mengembangkan variasi baru untuk tema lama (misalnya, perkembangan pemikiran Robert Nozick mengenai teori hukum alam John Locke) maupun dalam mengembangkan perspektif baru (misalnya, feminisme) (Kymlicka, 1998). Akan tetapi, mengingat kompleksitas dan urgensi dari masalah keadilan dewasa ini, dan mengingat kebutuhan untuk mengembangkan konsep keadilan dalam masyarakat kita sendiri (jika kita percaya ada), maka ada kebutuhan untuk menekankan pentingnya pandangan abstrak spekulatif dalam filsafat politik itu diintegrasikan dengan riset empirik dalam tradisi ilmu sosial politik. Sifat abstrak dari konsep-konsep filsafat memberikan ruang bagi analisis lebih jauh dan bagi usaha mengembangkan usaha-usaha yang lebih praktis, jadi apa, misalnya, implikasi dari prinsip keadilan internasional untuk menghapuskan hutang atau mengatur lingkungan hidup atau kebijaksanaan imigrasi atau intervensi kemanusiaan. Di sinilah, saya kira, alasan mengapa ada kebutuhan bahwa analisis kefilsafatan harus diintegrasikan dengan penjelasan-penjelasan empirik dan teoritis mengenai hakikat politik global.

Kesimpulan

Pentingnya integrasi ilmu pengetahuan mengakhiri tulisan ini. Akan tetapi, saya ingin menutup tulisan ini dengan menekankan dua poin utama dan kemudian mengusulkan sejumlah agenda untuk kemungkinan riset di masa depan.

Pertama, kita melihat bahwa pokok yang mendasari diskusi tentang fenomena globalisasi di satu pihak dan kemiskinan dan ketimpangan global di pihak lain adalah kebutuhan untuk menerima keadilan sebagai masalah yang perlu mendapatkan prioritas penanganan.

Kedua, masalah keadilan meskipun merupakan topik yang rumit, memiliki bahan yang kaya dan luas dan merupakan pokok yang sangat mendesak dan penting untuk dikembangkan dan dikaji. Tantangan utama yang dihadapi, setidaknya dalam perkembangan ilmu pengetahuan sekarang adalah mengintegrasikan pencapaian studi ilmu-ilmu kemanusiaan, terutama filsafat politik yang memang abstrak dan spekulatif dengan pendekatan yang lebih empiris dan teoritis dari tradisi ilmu-ilmu sosial-politik.

Apa yang mungkin dapat disarankan untuk riset di masa depan? Dua pilihan mungkin berharga untuk dipertimbangkan: *Pertama,* baik studi filsafat politik maupun ilmu-ilmu sosial politik dapat memusatkan perhatian pada cita-cita keadilan entah itu domestik atau global. Seperti yang sudah kita lihat, memang ada perselisihan berkenaan dengan *apa prinsip-prinsip* keadilan dan *pada apa prinsip-prinsip* itu harus diaplikasikan: apakah pada level global ataukah pada level domestik. Pada hemat saya kedua level ini penting untuk ditangani, dan usaha intelektual dapat dilakukan secara simultan baik oleh ilmu filsafat maupun ilmu-ilmu sosial-politik .

Kedua, karena perkembangan teori-teori keadilan selama ini di dominasi oleh tradisi etika Barat, jika kita ingin menganalisa norma-norma dan prinsip keadilan maka merupakan sesuatu yang penting dan kiranya akan sangat bermanfaat mengeksplorasi tradisi pemikiran kita sendiri. ***

Daftar Pustaka

Baylis, John, dan Smith, Steve, ed., (1998). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.

Brown, Chris, (1997). 'Review Article: Theories of International Justice.' *British Journal of Political Science*. Vol. 21, pp. 371-91.

Caney, Simon, (2001). 'Cosmopolitan Justice and Equalizing Opportunities.' Dalam Thomas W. Pogge, (ed.). *Global Justice*. Oxford: Blackwell, pp. 123-144.

Caney, Simon, (2001). 'Review Article: International Distributive Justice.' *Political Studies*. Vol. 49, pp. 974-997.

DeMartino, George F., (2000). *Global Economy, Global Justice: Theoretical Objections and Policy Alternative to Liberalism*. London: Routledge.

FAO, http://www.fao.org/focus/e/sofi/child-e.htm.

Forst, Rainer, (2001). 'Towards a Critical Theory of Transnational Justice.' Dalam Thomas W. Pogge, (ed.). *Global Justice*. Oxford: Blackwell, pp. 169-188.

Held, David dan Anthony McGrew, (1998). 'The End of The Old Order? Globalization and the Prospect of World Order.' *Review of International Studies*. pp. 219-243.

Held, David, (1997). 'Democracy: From City States to Cosmopolitan Order?' Dalam Robert E. Goodin dan Phillip Pettit (eds). *Contemporary Political Philosophy: An Anthology*. Oxford: Blackwell Publishers, pp. 78-101.

Hinsch, Wilfried, (2001). 'Global Distributive Justice.' Dalam Thomas W. Pogge (ed.). *Global Justice*. Oxford: Blackwell, pp. 55-75.

ILO, http://www.ilo.org/public/english/27asie/feature/child.htm.

Jones, Charles, (1999). *Global Justice: Defending Cosmopolitanism*, Oxford: Oxford University Press.

Kymlicka, Will, (1990). *Contemporary Political Philosophy: Introduction*. Oxford: Oxford University Press.

Pogge, Thomas W., (2001). 'Priorities of Global Justice.' Dalam Thomas W. Pogge (ed.). *Global Justice*. Oxford: Blackwell, pp. 6-23.

Pieterse, Jan Nederveen, (2002). 'Global Inequality: Bringing Politics Back In.' *Third World Quarterly*. Vol. 23, No. 6, pp. 1023-1046.

Scholte, Jan Aart, (1997a). 'Global Capitalism and the State.' *International Affairs*. Vol. 73, No. 3, pp. 427-452.

Scholte, Jan Aart, (1997b). 'The Globalization of World Politics.' Dalam John Baylis dan Steve Smith (eds). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press, pp. 13-30.

UNDP, (1996). *Human Development Report 1996*. New York: Oxford University Press.

UNDP, (2000). *Human Development Report 2000*. New York: Oxford University Press.

UNDP Report 1999, (2002). 'Globalization with a Human Face.' Dalam David Held dan Anthony McGrew (eds.).*The Global Transformation Reader: An Introduction to the Globalization Debate*. Oxford: Blackwell, pp. 341-347

World Bank, (1999). *World Development Report, 1999/2000*. New York, Oxford University Press. Juga tersedia dalam http://www.worldbank.org/wdr/2000/ fullreport.html